

RINGKASAN

**ADE ADIS SYAHPUTRI
NIM 210510347**

**TINJAUAN HUKUM PELAKSANAAN
FUNGSI LEGISLASI DEWAN
PERWAKILAN RAKYAT REPUBLIK
INDONESIA PADA MASA TRANSISI
(Harun, S.H., M.H., dan Dr. Amrizal, S.H.,
LL.M.)**

Pembahasan ini menyoroti pelaksanaan fungsi legislasi DPR RI pada masa transisi pemerintahan yang secara normatif tetap berwenang membentuk undang-undang, namun dalam kenyataannya belum didukung pengaturan hukum khusus yang mengarahkan atau membatasi kewenangan tersebut. Kondisi ini menyebabkan praktik pengesahan undang-undang strategis menjelang akhir masa jabatan DPR berlangsung tanpa jaminan transparansi, partisipasi publik, dan kualitas pembentukan hukum yang memadai, sehingga menimbulkan kritik serta berujung pada pembatalan oleh Mahkamah Konstitusi karena cacat formil. Dengan demikian, terdapat ketidaksesuaian antara kewenangan konstitusional DPR dan praktik legislasi pada masa transisi yang berdampak pada legitimasi, akuntabilitas, dan keabsahan produk undang-undang.

Penelitian ini menganalisis pelaksanaan fungsi legislasi DPR RI pada masa transisi dengan menyoroti pengaruh perubahan politik dan hukum terhadap proses pembentukan undang-undang, baik dari sisi kewenangan konstitusional maupun praktiknya, untuk memahami bagaimana dinamika kekuasaan dan kondisi politik yang tidak stabil memengaruhi jalannya fungsi legislasi DPR.

Penelitian ini menggunakan pendekatan normatif dengan analisis deskriptif melalui kajian peraturan perundang-undangan, studi pustaka, analisis dokumen legislasi DPR RI yang didukung oleh sumber pustaka sebagai data sekunder.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa pelaksanaan fungsi legislasi DPR RI pada masa transisi menghadapi berbagai kendala, seperti ketidakstabilan politik, keterbatasan waktu pembahasan, dominasi kepentingan politik sesaat, serta minimnya partisipasi publik. Kondisi tersebut berdampak pada menurunnya kualitas proses legislasi, baik dari aspek prosedural maupun substansial, sehingga menyebabkan legitimasi produk hukum yang dihasilkan pada masa transisi sering dipertanyakan oleh masyarakat, sebagaimana terlihat pada pengesahan Undang-Undang Cipta Kerja dan revisi Undang-Undang KPK.

Penelitian ini menyimpulkan bahwa legitimasi produk hukum pada masa transisi sangat dipengaruhi oleh kualitas proses legislasi yang dijalankan DPR RI, terutama dalam hal transparansi, partisipasi publik, dan stabilitas politik. Oleh karena itu, disarankan agar DPR RI memperkuat pengaturan legislasi pada masa transisi, meningkatkan keterbukaan dan partisipasi masyarakat, serta menjaga independensi dan akuntabilitas proses legislasi guna menghasilkan produk hukum yang demokratis, berkualitas, dan memiliki legitimasi yang kuat.

Kata Kunci : Fungsi Legislasi, Dewan Perwakilan Rakyat, Masa Transisi.

SUMMARY

ADE ADIS SYAHPUTRI
NIM 210510347

**LEGAL REVIEW OF THE
IMPLEMENTATION OF THE LEGISLATIVE
FUNCTION OF THE PEOPLE'S
REPRESENTATIVE COUNCIL OF THE
REPUBLIC OF INDONESIA DURING THE
TRANSITION PERIOD**

**(Harun, S.H., M.H., dan Dr. Amrizal, S.H.,
LL.M.)**

This discussion highlights the exercise of the legislative function of the House of Representatives of the Republic of Indonesia (DPR RI) during the governmental transition period, which normatively retains the authority to enact laws but is not supported in practice by specific legal regulations that direct or limit such authority. This condition has led to the passage of strategic laws toward the end of the DPR's term without adequate guarantees of transparency, public participation, and legislative quality, resulting in public criticism and, in some cases, annulment by the Constitutional Court due to formal defects. Consequently, there is a mismatch between the DPR's constitutional authority and legislative practice during the transition period, affecting the legitimacy, accountability, and validity of enacted laws.

This study analyzes the implementation of the DPR RI's legislative function during the transition period by examining the influence of political and legal changes on the law-making process, both in terms of constitutional authority and actual practice, in order to understand how shifting power dynamics and political instability affect the exercise of the DPR's legislative function

The research employs a normative approach with descriptive analysis through the examination of prevailing laws and regulations, literature review, analysis of DPR RI legislative documents, and interviews as primary data, supported by books, journals, and relevant articles as secondary data.

The findings indicate that the implementation of the DPR RI's legislative function during the transition period faces various obstacles, including political instability, limited time for deliberation, the dominance of short-term political interests, and minimal public participation. These conditions negatively affect the quality of the legislative process, both procedurally and substantively, resulting in the frequent questioning of the legitimacy of laws enacted during the transition period, as reflected in the enactment of the Job Creation Law and the revision of the KPK Law.

This study concludes that the legitimacy of legal products enacted during the transition period is strongly influenced by the quality of the legislative process carried out by the DPR RI, particularly in terms of transparency, public participation, and political stability. It is recommended that the DPR RI strengthen regulatory arrangements governing legislation during the transition period, enhance openness and public participation.

Keywords: Legislative Function, House of Representatives, Transition Period.